

**PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2024**

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta, No. 05 Eks Kantor Bupati  
SANGATTA



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1   Latar Belakang.....	1
1.2   Landasan Hukum.....	2
1.3   Maksud dan Tujuan.....	3
1.4   Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II       EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	5
2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	5
2.2   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	16
<b>BAB III      TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b> .....	20
<b>BAB IV      PENUTUP</b> .....	28
<b>LAMPIRAN   LAPORAN EVALUASI KINERJA TW IV</b> .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Tahun 2023.....	10
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Tahun 2023.....	14
Tabel 3.1 Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.....	24

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat rincian mengenai Program, Kegiatan, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan Program/Kegiatan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Sangatta, Desember 2023

**Kepala Pelaksana**



**Dr. H. Muhammad Idris, Syam, SKM., M.Si**

NIP. 19690912 199312 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja di susun sesuai usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD .

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju .

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kutai Timur ini disusun berdasarkan landasan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Permendagri No. 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan RPB;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan**

Maksud penyusunan Renja Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah agar terarahnya kegiatan dan rencana kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renja Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur selama 1 (satu) tahun yang selaras dengan Renstra Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2024.

### 1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan RKPD.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, untuk jangka pendek. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- BAB II** : **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**; berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- BAB III** : **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**; berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.
- BAB IV** : **PENUTUP**; berisi Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang direncanakan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPBD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BPBD sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi rencana kerja BPBD pada tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur mengajukan usulan program sebanyak 2, kegiatan sebanyak 11 dan 26 Sub Kegiatan.

Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 :

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

##### 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

##### 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

##### 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

##### 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

##### 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Renja Tahun 2024** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

## **B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

### **1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

### **2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

### **3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

- Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

### **4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) TW IV Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44,09% dan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 161,91 IRB, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja TW IV Tahun 2023

Laporan Apbd Triwulan-IV 2023 [1.05.0.00.0.00.04.0000] Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2023		Predikat			
				Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV		(9)		(10)		(11)			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	34,821,121,955	0	3,100,521,227	0	0	0	14,545,666,855	0	27,200,712,928	0	27,200,712,928	62.09	78.12	SR	T	
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %	18,108,911,055	0	2,802,556,351	0	0	38	8,035,126,714	100	13,723,119,191	138	13,723,119,191	138	75.78	ST	S	
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	388,949,176	1	60,364,100	0	0	2	272,268,100	2	316,430,362	5	316,430,362	250	81.96	ST	T
1.05.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	305,361,349	0	47,035,600	0	0	5	237,707,000	5	251,168,600	10	-	200	0	ST	SR
1.05.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	83,587,827	0	13,328,500	0	0	1	34,561,100	3	65,261,762	4	-	133.33	0	ST	SR
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4	Dokumen	11,843,677,555	2	2,466,988,009	0	0	2	6,210,204,627	4	8,311,107,966	8	8,311,107,966	200	70.17	ST	S
1.05.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang/bulan	7,392,961,451	0	1,730,067,537	0	0	38	4,581,997,256	38	5,757,209,165	76	-	200	0	ST	SR
1.05.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68	Dokumen	3,470,726,104	0	580,341,072	0	0	68	1,280,920,071	68	2,141,127,201	136	-	200	0	ST	SR
1.05.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	358,200,000	0.4	142,043,200	0	0	0.9	289,895,300	1	348,406,100	2.3	-	230	0	ST	SR
1.05.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	81,790,000	0.2	14,536,200	0	0	0.9	57,392,000	1	64,365,500	2.1	-	210	0	ST	SR
1.05.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2	Dokumen	50,000,000	0	1,785,600	0	0	2	38,035,600	2	38,035,600	4	38,035,600	200	76.07	ST	T
1.05.001.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50,000,000	0.5	1,785,600	0	0	1	38,035,600	1	38,035,600	2.5	-	250	0	ST	SR
1.05.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	%	1,196,864,737	0	-	0	0	1.52	18,170,000	100	1,147,316,837	101.52	1,147,316,837	101.52	95.86	ST	ST
1.05.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200	Paket	657,434,400	0	-	0	0	-	200	640,150,000	200	-	100	0	ST	SR	
1.05.001.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46	Orang	539,430,337	0	-	0	0	0	18,170,000	46	507,166,837	46	-	100	0	ST	SR
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	%	2,411,782,787	20	111,669,764	0	0	40	616,092,107	100	2,202,860,535	160	2,202,860,535	160	91.94	ST	ST
1.05.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55	Paket	1,625,984,185	0	17,533,200	0	0	13	123,812,180	55	1,573,129,490	68	-	123.64	0	ST	SR
1.05.001.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	785,798,602	0	94,136,564	0	0	20	492,279,927	20	629,731,045	40	-	200	0	ST	SR
1.05.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Unit	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	%	439,566,800	20	155,939,428	0	0	80	358,131,230	100	394,375,356	200	394,375,356	200	89.72	ST	T
1.05.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	-	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	SR	SR

1.05.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	247,650,000	0.5	124,340,128	0	0	0.9	223,442,380	1	231,054,606	2.4	-	240	0	ST	SR
1.05.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	191,916,800	0.2	81,599,300	0	0	0.9	134,688,850	1	165,520,750	2.1	-	210	0	ST	SR
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan (Dinas/Operasional/Lapangan yang terpelihara	100	Unit	1,778,070,000	0	5,809,450	0	0	68	522,225,050	100	1,312,992,535	168	1,312,992,535	168	73.84	ST	S
1.05.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	Unit	142,738,000	0.2	5,809,450	0	0	15	127,274,316	17	136,369,566	32.2	-	189.41	0	ST	SR
1.05.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	96	Unit	1,635,332,000	0	-	0	0	53	394,950,734	96	1,176,622,969	149	-	155.21	0	ST	SR
1.05.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Bervujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Bervujud yang Dipelihara	1	Unit	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.001.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks Risiko Bencana	161	IRB	16,712,210,900	0	297,964,476	0	0	161.91	6,510,540,141	161.91	13,471,593,737	323.82	13,471,593,737	201.13	80.65	ST	T
1.05.003.2.01	Pelaksanaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	70	%	1,300,000,000	0	-	0	0	100	395,244,706	100	766,054,388	200	766,054,388	285.71	69.64	ST	S
1.05.003.2.01.001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dipelembangkan	1	Dokumen	700,000,000	0	-	0	0	0.9	78,556,085	1	449,365,767	1.9	-	190	0	ST	SR
1.05.003.2.01.002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Terpapar di Daerah Rawan Bencana Sesuai jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	200	Orang	400,000,000	0	-	0	0	200	316,688,621	200	316,688,621	400	-	200	0	ST	SR
1.05.003.2.02	Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75	%	13,971,468,000	0	297,964,476	0	0	60	5,675,101,530	100	11,722,164,380	160	11,722,164,380	213.33	83.9	ST	T
1.05.003.2.02.001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	500,000,000	0	-	0	0	0	-	1	464,580,800	1	-	100	0	ST	SR
1.05.003.2.02.002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	335	Orang	1,860,000,027	0	-	0	0	165	873,464,800	355	1,533,428,147	520	-	155.22	0	ST	SR
1.05.003.2.02.003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5	Dokumen	9,378,418,069	0.2	277,323,992	0	0	4	4,248,473,126	5	7,726,103,764	9.2	-	184	0	ST	SR
1.05.003.2.02.004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga, maupun Petugas	13	Unit	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.02.006	Peningkatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	Kawasan	100,000,000	0.2	20,640,884	0	0	1	57,738,884	1	59,562,884	2.2	-	220	0	ST	SR
1.05.003.2.02.007	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	1	Laporan	1,833,049,904	0	-	0	0	1	485,152,520	1	1,704,033,920	2	-	200	0	ST	SR
1.05.003.2.02.008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	300,000,000	0	-	0	0	0	9,272,200	30	214,454,865	30	-	100	0	ST	SR
1.05.003.2.02.009	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	Dokumen	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.02.010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0	Orang	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.03	Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	85	%	1,096,742,900	0	-	0	0	52	273,348,098	100	539,227,498	152	539,227,498	178.82	49.44	ST	SR
1.05.003.2.03.002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0	Dokumen	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.03.003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	Orang	300,000,000	0	-	0	0	0	-	2	58,151,300	2	-	2	0	SR	SR
1.05.003.2.03.004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Orang	137,542,900	0	-	0	0	0	-	52	39,360,900	52	-	52	0	R	SR
1.05.003.2.03.005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	653,200,000	0	-	0	0	0.9	271,348,098	2	441,715,298	2.9	-	145	0	ST	SR
1.05.003.2.03.006	Respon Cepat Bencana Non Alam (Epidemi/Wabah Penyakit)	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1	Dokumen	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.04	Pemetaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pemetaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	70	%	550,000,000	0	-	0	0	0	168,845,807	100	450,147,471	100	450,147,471	142.86	81.84	ST	T
1.05.003.2.04.001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	Dokumen	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.04.003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.04.004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1	Dokumen	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.04.005	Revisi dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Bimwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	Laporan	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.05.003.2.04.006	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (ITU PASNA) Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (ITU PASNA) Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	Dokumen	550,000,000	0	-	0	0	0.8	168,845,807	1	450,147,471	1.8	-	180	0	ST	SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja  
Faktor penghambat pencapaian kinerja  
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya  
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Apod Peringkat Daerah berikutnya :

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2021 telah mencapai target, namun tentu saja masih banyak yang perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pelayanan penanggulangan bencana. Terbatasnya anggaran yang dimiliki pada tahun 2023 perlu ditingkatkan pada tahun 2024 guna peningkatan pelayanan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah rawan bencana terutama bencana banjir. Kabupaten Kutai Timur memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam sehingga memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Beberapa jenis bencana yang paling rawan terjadi di Kutai Timur antara lain : banjir, tanah longsor, angin puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di semua bagian wilayah. Berkaitan dengan capaian indikator kinerja BPBD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam rencana strategis telah sesuai dengan target. Pencapaian tersebut diperoleh atas usaha dan kerjasama semua pihak.

Dukungan kebutuhan dalam pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur perlu ditingkatkan kedepan. Mulai dari penguatan kelembagaan dimana saat ini BPBD Kutai Timur masih perlu Legalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana , Dokumen Rencana Penanggulangan, dan Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rehbilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar perencanaan Penanggulangan Bencana terarah kedepannya.

Potensi Relawan tersebar di beberapa wilayah yang Rawan bencana, hingga tahun 2023 sudah memiliki Relawan Desa tangguh Bencana dan Masyarakat Peduli Api yang sudah terlatih. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui relawan ini akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan sinergi dari pihakpihak terkait yang saling berperan, penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kutai Timur akan semakin meningkat.

Dari analisa tersebut, selain Indikator Kinerja Utama yang dimiliki, BPBD Kabupaten Kutai Timur juga ada indikator lain berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ada sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur, Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana Tahun 2023 sebesar 65,80% (Tuntas Muda) artinya program kegiatan Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana perlu ditingkatkan dan perlu Dukungan Anggaran dan penyusunan Dokumen SPM Sub Urusan Bencana.

Indikator Capaian Program Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD  
Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian (SPM) Sub Urusan Bencana	Realisasi Capaian		Proyeksi	
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penurunan Indeks Risiko Bencana	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan bencana		161	65,80%	161,91	160	150	140
2.	Persentase Pelayanan Informasi Rawan		Jumlah Orang yang telah menda	70%		100%			

	Bencana		patkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana/Jumlah Penduduk Daerah Rawan Bencana x 100%						
3	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Kelompok Masyarakat SDM yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas/umlah	75%		100%			

			Penduduk Daerah Rawan Bencana x100 %						
4.	Persentase Pelayanan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Korban Bencana yang telah Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana / Jumlah Penduduk yang Mendapatkan	85%		100%			

			Distri busi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana x 100 %						
5.	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun/Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana x	85%		100%			

			100 %						
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 sebesar Rp. **34,821,121,955,-** , terdiri dari 2 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Besarnya alokasi anggaran per program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Tahun 2023

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>APBD</b>	
<b><i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b>388.949.176</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.361.349	
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kenerja SKPD	83.587.827	
<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b>11.843.677.555</b>	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	7.932.961.451	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.470.726.104	
Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	358.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD	81.790.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<b>0</b>	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
<b><i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i></b>	<b>50.000.000</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	
Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	50.000.000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	
<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	<b>1.196.864.737</b>	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	657.434.400	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	539.430.337	
<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b>2.411.782.787</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.625.984.185	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	785.798.602	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>0</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	
Pengadaan Mebel	0	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>439.566.800</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.650.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.916.800	
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>1.778.070.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.738.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.635.332.000	DBH-DR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>16.712.210.900</b>	
<b><i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i></b>	<b>1.100.000.000</b>	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	700.000.000	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	400.000.000	DBH-DR
<b><i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i></b>	<b>13.971.468.000</b>	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.860.000.27	DBH-DR
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	9.378.418.069	DBH-DR
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100.000.000	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.833.049.904	DBH-DR
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	300.000.00	
Penyusunan Rencana Kontijensi	0	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	
<b><i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i></b>	<b>1.090.742.900</b>	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0	
Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	132.542.900	
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	0	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	550.000.000	DBH-DR
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>550.000.000</b>	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	0	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	550.000.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>34,821,121,955</b>	

### 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terdapat tiga tahap yaitu pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana. BPBD Kabupaten Kutai Timur berperan penting menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan tersebut. BPBD Kabupaten Kutai Timur menjadi koordinator dan harus menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait karena penanggulangan bencana merupakan tugas dari setiap pihak terkait tidak hanya BPBD Kabupaten Kutai Timur.

Peran instansi sektoral seperti DPUPR Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial dan Dinas lain sangat penting dalam penanggulangan bencana. BPBD harus terus berkoordinasi dan memperkuat kerjasama dengan instansi tersebut. Kegiatan yang melibatkan instansi sektoral tersebut menjadi kunci dalam memaksimalkan pelayanan. Setiap instansi yang memiliki dukungan masing-masing dikoordinir oleh BPBD dalam menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.

Peran Masyarakat sangat penting, karena masyarakat menjadi ujung tombak pelaksanaan penanggulangan bencana. Melalui pemberdayaan masyarakat yang baik, akan muncul relawan-relawan penanggulangan bencana yang memiliki kualitas dalam kemampuan penanggulangan bencana.

BPBD sebagai naungan bagi para relawan, menjadi kunci untuk memperkuat sekaligus memperbanyak jumlah relawan yang ada sehingga setiap desa akan terdapat relawan menjadi ujung tombak penanggulangan bencana nantinya.

Peran swasta, media dan lembaga pendidikan juga merupakan hal yang penting, Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, 3 pihak tersebut akan mampu meningkatkan

kualitas, swasta akan memberikan dukungan anggaran maupun dukungan tenaga, media akan mempercepat penyebaran informasi terkait kebencanaan, dan Lembaga Pendidikan akan menambah ilmu pengetahuan dalam pelayanan penanggulangan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012, BPBD mempunyai Tugas sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan (uang dan barang) bencana;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BPBD Kabupaten Kutai Timur dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensinya di masa yang akan datang. Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Indonesia, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi negara ini yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (Ring of Fire) menyebabkan ratusan gunungapi dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Indonesia terancam bencana longsor, banjir dan kekeringan.

Perlu adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan daerah yang berbasis kebencanaan. Tiga dokumen yang harus dimiliki daerah terkait kebencanaan, yaitu Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi per Bencana.

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat

dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Perangkat penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari tujuh prioritas dan 71 indikator yang harus di penuhi.

Daerah harus mengetahui kapasitas dirinya sendiri dan mampu menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menurunkan IRBI. IKD yang menjadi salah satu unsur dalam KRB dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Dengan penurunan IRBI, adanya KRB dan kebijakan penanggulangan bencana, maka diharapkan terwujud kabupaten yang tangguh menghadapi bencana.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi adalah Bagaimana menentukan sasaran program dan kegiatan yang harus dilaksanakan yang dirumuskan dalam kebijakan- kebijakan seperti :

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana;
2. Mengembangkan sistem penanggulangan berbasis masyarakat;
  1. Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat;
  2. Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
  3. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana.

Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana :

1. Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
2. Pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
4. BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Timur;
6. Pemenuhan Logistik Penanggulangan Bencana;
7. Peningkatan SDM dalam Penanggulangan Bencana;
8. Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan efisien;
10. Responsif dalam penanganan tanggap darurat bencana;

11. Peningkatan asament penanggulangan bencana pada komunitas masyarakat desa mandiri.
12. Terselenggaranya koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
13. Terlaksananya Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekontruksi;
14. Tersusunnya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana;
15. Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana;
16. Terselenggaranya monitorig dan evaluasi pascabencana;
17. Optimalisasi rehabiltasi dan rekontruksi pada seluruh bidang;
18. Pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat siaga bencana.

Agar strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur tercapai perlu menerapkan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dengan memprioritaskan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, paling sedikit memuat :**
  - a) Penyusunan kajian risiko bencana; dan
  - b) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
- 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;**
  - a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b) pembuatan rencana kontinjensi;
  - c) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
  - d) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - e) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - f) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:**
  - a) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
  - b) Respon cepat darurat bencana;
  - c) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
  - d) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
  - e) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

Tujuan Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahunan. Sasaran Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai timur dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Perangkat Daerah selama 1 (Satu) tahun. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi pembangunan daerah yaitu :

Visi

**“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”**

Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkesesuaian dengan tugas dan pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Misi 3 (Tiga) yaitu”

**“MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”**

Sedangkan tujuan RPJMD yang berkesesuaian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Tujuan 1 (satu) yaitu:

**“Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata”**

**Dengan sasaran :** Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan / Pemukiman, melalui, *Indikator : Indeks Risiko Bencana*

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan dan sasaran RPJMD tersebut di atas, maka tujuan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah;

**“Mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana yang Profesional”**

**Dengan sasaran :**

Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten, melalui *Indikator : Penurunan Indeks Risiko Bencana.*

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Rancangan Akhir Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timur Tahun 2024 meliputi, yaitu :

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

##### **2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

##### **3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Koordinasi dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

### **1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

### **2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kontinjensi
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana

### **3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit

### **4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Tabel 3.1

Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA	KET.
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.993.688.296</b>		<b>APBD</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000		
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000.000		
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000.000		
1.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000		
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.928.688.296</b>	<b>Sekretariat</b>	
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.968.601.199		
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.410.344.296		
2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400.000.000		
2.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000		
2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	50.000.000		
2.6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000		
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	
3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000		
3.2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0		
3.3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0		
3.4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	50.000.000		
3.5.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0		
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>420.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	
4.1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0		

4.2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000		
4.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000		
4.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60.000.000		
4.5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000		
4.6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0		
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>730.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	
5.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000		
5.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000		
5.3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000		
5.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000		
5.5.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000		
5.6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000		
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>Sekretariat</b>	
6.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0		
6.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0		
6.3.	Pengadaan Mebel	0		
6.4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0		
6.5.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0		
6.6.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0		
6.7.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		
6.8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		
6.9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>465.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	
7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		
7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000		
7.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000		
7.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000		
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>800.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	

8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000		
8.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000		
8.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000		
8.4.	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	50.000.000		
8.5.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0		
8.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000		
8.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>20.220.000.000</b>		<b>APBD</b>
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	
1.1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000		
1.2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200.000.000		
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>18.600.000.000</b>	<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	
2.1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000		
2.2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000		
2.3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000		
2.4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	16.250.000.000		
2.5.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100.000.000		
2.6.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000		
2.7.	Penyusunan Rencana Kontinjensi	200.000.000		
2.8.	Gladi Kesiapsiagaan	250.000.000		
2.9.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	100.000.000		
2.10.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	100.000.000		
2.11.	Pengelola Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000		
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>750.000.000</b>	<b>Kedaruratan, Logistik dan Peralatan</b>	
3.1.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0		

3.2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000		
3.3.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000		
3.4.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000		
3.5.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50.000.000		
3.6.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	0		
<b>4.</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>620.000.000</b>	<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	
4.1.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0		
4.2.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	0		
4.3.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000		
4.4.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	50.000.000		
4.5.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	20.000.000		
4.6.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	500.000.000		
	<b>Total</b>	<b>36.163.945.495</b>		

Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah**, maka kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 sesuai dengan **Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah**. Rencana kerja dan target kegiatan tahun 2024 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun target kegiatan tahun 2024 yaitu terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.

#### BAB IV

## P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur (BPBD) Tahun 2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, sebagai Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Diharapkan Renja ini akan memberikan peran dalam meningkatkan koordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kebencanaan dan senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat umum terutama masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Salah satu faktor pendukung penentu sukses dan tidaknya pelaksanaan kegiatan adalah faktor pendanaan. Jumlah anggaran yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan baik itu pelaksanaan kegiatan di sekretariat maupun pelaksanaan kegiatan pada bidang.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD Tahun Anggaran 2024, menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

# LAMPIRAN